

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia memasuki babak baru pengelolaan pemerintahan dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. Bentuk pelaksanaan desentralisasi ditandai dengan diberlakukannya otonomi daerah yang sejalan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mengatur tentang Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal (Adi, 2009).

Dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah Indonesia diberikan kesempatan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memberikan hak dan kewajiban kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ciri utama yang menunjukkan bahwa suatu daerah merupakan daerah otonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah, artinya daerah otonomi harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada pemerintah pusat diusahakan seminimal

mungkin. Perimbangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dapat dikatakan ideal apabila setiap pemerintah mampu mengatur keuangannya untuk membiayai tugas dan wewenang daerahnya masing-masing.

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur rumah tangga daerahnya adalah kemampuan daerah dalam bidang keuangan daerah. Dimana keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Manajemen keuangan daerah adalah pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber daya atau kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan oleh daerah tersebut. Kemampuan daerah untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan daerah tersebut disebut kinerja keuangan pemerintah. Sehubungan dengan efektifnya otonomi daerah maka kinerja pemerintah daerah dalam keuangan daerah sangat dituntut untuk membiayai aktivitas daerah melalui penggalan kekayaan asli daerah.

Untuk menghasilkan kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik, terdapat kendala dimana masih besarnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, karena kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah. Di samping itu semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibanding dengan sumber PAD yang berasal dari luar PAD. Hal ini karena PAD dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah demi

kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya. Selain PAD, Dana Perimbangan juga merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap struktur APBD. Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 disebutkan Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah.

Transfer antar pemerintah merupakan fenomena yang terjadi di semua negara yang terlepas dari sistem pemerintahannya (Kuncoro 2007). Pemberian dana transfer ini ditujukan untuk mengatasi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (disparitas vertikal), dan kesenjangan fiskal antar pemerintah daerah. Dalam perkembangannya, kinerja keuangan pemerintah justru tidak mengalami perkembangan yang berarti, bahkan cenderung mengalami penurunan.

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Kinerja Keuangan antara lain Florida (2007) menyimpulkan bahwa secara parsial hanya pajak daerah dan retribusi daerah yang dominan mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara, sedangkan laba BUMD dan Penerimaan Lain-lain yang sah tidak dominan mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara. Secara simultan

terdapat pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian lain yang dilakukan oleh Julitawati (2012) menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dan Dana Perimbangan juga berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Serta Rukmana (2013) menyimpulkan bahwa secara parsial Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Riau, secara parsial Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Riau, dan secara parsial Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Riau, serta secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Rukmana (2013) yang meneliti mengenai pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah provinsi kepulauan riau. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, Penelitian ini dilakukan dengan objek laporan realiasi anggaran Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan dengan objek laporan realisasi anggaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Pentingnya peran Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia menjadi alasan mengapa peneliti melakukan penelitian mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah yang ada.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan**

## **Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (studi pada Provinsi di Indonesia Periode 2009-2013)”.**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, secara garis besar peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan dapat meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Provinsi di Indonesia?
2. Apakah pajak daerah dapat mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Provinsi di Indonesia?
3. Apakah retribusi daerah dapat mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Provinsi di Indonesia?
4. Apakah dana perimbangan dapat mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Provinsi di Indonesia?

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah peneliti hanya meneliti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan serta pengaruhnya terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Provinsi di Indonesia.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi di Indonesia?
2. Apakah pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi di Indonesia?
3. Apakah retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi di Indonesia?
4. Apakah dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi di Indonesia?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka penelitian tujuan yang dilakukan adalah :

1. Untuk memberikan bukti apakah pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi di Indonesia.
2. Untuk memberikan bukti apakah pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi di Indonesia.

3. Untuk memberikan bukti apakah retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi di Indonesia.
4. Untuk memberikan bukti apakah dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi di Indonesia.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta memahami seberapa pentingnya pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah.

2. Bagi Pemerintah Provinsi di Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan dan masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah menjadi yang lebih meningkat di masa yang akan datang.

3. Bagi Universitas dan Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk penelitian lebih lanjut khususnya dalam bidang kajian yang sama.